

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Pintar Dana Desa.* (2017). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ariyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* .
- Arum, K. D., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance Di Indonesia. *JEAM Vol X No. 1*.
- Astuty, E., & Fanida, E. H. (2012). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).
- Basuki. (2016). *Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen Berbasis Studi Kasus*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bawono, I. R. (2007). Manajemen Strategik Sektor Publik : Langkah Tepat Menuju Good Governance.
- Bungin, B. (2009). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Efferin, S., Darmadji, S. H., & Tan, Y. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) Vol 2*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics Vol 3 No 4*, 305-360.
- Manopo, D. C. (2015). *Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara)*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.* (n.d.). Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.* (n.d.). Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.* (n.d.). Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014.* (n.d.). Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.* (n.d.). Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016.* (n.d.). Pemerintah Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: ALFABETA CV.
- Supheni, I. (2016). Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk). *eJournal*, Vol XI No 2.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebaang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *eJournal Pemerintah Integratif*.
- Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.* (n.d.). Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* (n.d.). Pemerintah Republik Indonesia.
- Yin, R. (2009). *Case Study Research: Design and Method.* California: Sage Publication, Inc.